

INTISARI

Gempa bumi yang terjadi pada 28 – 29 september 2018 di Palu mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu, Sulawesi Tengah juga dilanda oleh bencana tersebut. Gempa bumi tersebut mengakibatkan aktivitas lapas menjadi terganggu dan sejumlah napi melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Berdasarkan masalah penelitian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggap darurat bencana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Palu, menganalisis mekanisme proses evakuasi tanggap darurat di Lapas Kelas II A Palu, dan menganalisis kapasitas petugas lembaga pemasyarakatan Kelas II A di Palu, Sulawesi Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus, dengan instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi dokumentasi serta dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan secara dengan kriteria informan adalah pihak otoritas lapas dan narapidana yang terdampak oleh bencana di Lapas Kelas II A Palu, Sulawesi Tengah. Dokumen SOP digunakan sebagai instrumen dalam materi penelitian adalah SOP Nomor AS.220.OT.02.02.201.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses Implementasi SOP hanya 6 poin yang dapat dilakukan, 12 poin diantaranya tidak dilakukan. Beberapa hambatan berupa kegagalan infrastruktur serta sarana dan prasarana di lapas merupakan faktor yang melemahkan mekanisme proses evakuasi narapidana di Lapas kelas II A Palu, Sulawesi Tengah. Kapasitas petugas lapas yang tidak sesuai secara kualitas dan kuantitas juga turut memengaruhi merupakan faktor penghambat proses tanggap darurat di Lapas palu. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar petugas di Lapas Palu yang memiliki latar belakang tingkat pendidikan SMU di bagian pengamanan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan. Petugas lapas palu yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut sejumlah 51,72% atau 72 orang yang berlatarbelakang SMU, 16,22 % yang berlatarbelakang S1 dan 4,6% D III.

Kata Kunci : Gempa bumi, Lapas , Tanggap Darurat, SOP

ABSTRAK

Bencana gempa bumi yang terjadi di Palu pada 29 September 2018 mengakibatkan area lapas mengalami kerusakan pada bagian pagar pembatas yang roboh hingga mengganggu aktivitas Lapas. Menurut SOP tanggap darurat yang dikeluarkan oleh Ditjenpas menjelaskan bahwa penindakan terhadap keadaan tertentu dilakukan jika terjadi: a. pemberontakan; b. kebakaran; c. bencana alam; dan/atau d. penyerangan dari luar. Bencana alam merupakan salah satu dari 4 kriteria keadaan tertentu yang berada di bawah tanggung jawab tim tanggap darurat (Permenkumham No.33,2015). Berdasarkan hasil observasi dapat dilihat bahwa kapasitas lapas dalam penanganan darurat bencana berada pada kondisi panik, sehingga mengakibatkan mekanisme penanggulangan bencana di Lapas Kelas II A Palu tidak berjalan dengan baik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggap darurat bencana di Lapas Kelas II A Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan SOP Nomor AS.220.OT.02.02.201 yang dikeluarkan oleh Ditjenpas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta studi literatur terhadap penelitian yang terkait kejadian bencana alam di wilayah penelitian. Untuk pengambilan data di lapangan peneliti menggunakan instrumen observasi dan wawancara pada informan yang ditentukan secara sengaja. Berdasarkan kajian hasil analisis data penelitian disimpulkan bahwa 6 dari 12 poin pada SOP tersebut terimplementasi pada saat tanggap darurat di Lapas palu. Kapasitas petugas serta infrastruktur berupa sarana dan prasarana pendukung yang hancur juga turut menghambat mekanisme serta proses tanggap darurat di Lapas.

Kata Kunci :Gempa bumi, Lapas , Tanggap Darurat, SOP

ABSTRACT

The earthquake disaster that occurred in Palu on 29 September 2018 resulted in the prison area being damaged in the part of the guardrail that collapsed to disrupt Lapas activities. According to the SOP, the emergency response issued by the Directorate General of Post explained that action is taken against certain circumstances if: rebellion; b. Fire; c. natural disasters; and / or d. attack from outside. Natural disasters are one of the 4 criteria for certain conditions which are under the responsibility of the emergency response team (Permenkumham No.33,2015). Based on observations it can be seen that the capacity of prisons in disaster emergency management is in a panic condition, resulting in the mechanism of disaster management in Class II A Correctional Facilities in Palu not going well. The main objective of this research is to analyze disaster response in Lapas Class II A Palu, Central Sulawesi based on SOP Number AS.220.OT.02.02.201 issued by Ditjenpas. The method used in this research is descriptive qualitative and literature study on research related to natural disaster events in the research area. For data collection in the field the researchers used observation instruments and interviews with deliberately determined informants. Based on a review of the results of the analysis of the research data it was concluded that 6 of the 12 points in the SOP were implemented during the emergency response in Lapas Palu. The capacity of officers and infrastructure in the form of facilities and supporting infrastructure that were destroyed also helped hamper emergency response mechanisms and processes in Lapas.

Keywords: Earthquakes, Lapas, Emergency Response, SOP